

Veven Sp. Wardhana,

Budaya Massa, Agama, dan Wanita,

Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013,

228 hlm.



Budaya massa, dalam pengertian sederhana adalah “karya kreatif yang dimassalkan, yang diproduksi secara masif, yang ditunjang teknologi dan industri tinggi [...] termasuk model pakaian, *fashion*, film, televisi, musik pop, *lifestyle* atau gaya hidup” (hlm. xiii-xiv). Agama, atau lebih tepatnya “tafsir atas agama, atau tafsir atas ajaran agama” (hlm. xiv) dapat menjadi tema karya kreatif itu. Contohnya, terutama, sinetron-sinetron religi bernuansa Islami yang sekarang ini semakin banyak tampil pada layar televisi, tanpa menunggu bulan istimewa Ramadhan.

Selain itu, agama juga dapat menjadi sensor untuk menentukan karya kreatif yang pantas dimassalkan lewat media elektronik maupun media cetak. *sense* yang digunakan oleh para penyensor adalah moral dan ajaran agama, yang dalam keyakinan mereka harus dijaga. Para penyensor ini bukan hanya lembaga sensor, melainkan juga kelompok-kelompok yang menyebut diri pembela agama tertentu. Lembaga sensor menyampaikan larangan; kelompok-kelompok ini menyerukan protes. Mengemban misi menjaga moral dan ajaran agama, para penyensor dan pemrotes lebih sering mengajukan argumen sensor yang tidak masuk akal (*doesn't make sense*) alias “ajaib” (hlm. 163) dan konyol.

Lebih ajaib dan konyol, mereka, yang mengaku menjunjung agama dan moral, tidak punya *sense* mengenai ketidakadilan, khususnya yang dialami wanita. Produk budaya massa yang menciptakan *image* negatif wanita dibiarkan menjejali benak masyarakat. Wanita harus dikendalikan—sebab ia binal, nakal—dengan cara diambil hak atas tubuhnya, dibungkam suaranya, dipermalukan di hadapan publik, dan kalau perlu dirajam oleh massa, yang adalah laki-laki dan (sama-sama) wanita.

Ketidakadilan terhadap wanita, yang dipublikasikan oleh budaya massa dan ajaran agama menjadi sorotan utama Veven Sp. Wardhana di dalam buku ini. Dipublikasikan di sini berarti ditampilkan di ruang publik supaya diterima sebagai sesuatu yang wajar dan sewajarnya oleh masyarakat. *Perempuan: seksualitas, sunat, syahwat; Puanografi: Yang Bukan Perempuan (Tak) Ambil Bagian; Televisi dan Fashionista atawa Perempuan Nista; Perempuan di Layar Televisi: Dari Losmen sampai sinema Relijius; dan Catatan sipil, Media Hiburan, dan Fatwa Haram* adalah lima judul yang paling sarat dengan gugatan Wardhana atas perlakuan tidak adil terhadap wanita di negeri ini.

Di dalam bagian-bagian lain, Wardhana memperlihatkan bahwa budaya massa dan agama nyatanya dikendalikan oleh kekuasaan kapitalisme dan politik. Wanita bukan korban tunggal permainan keempat penguasa arena publik ini. Para kreator pun dapat dirampas hak dan suara mereka. Ulasan Wardhana tentang hal ini membawa ingatan pada pemaparan seorang antropolog, Saya Sasaki Shiraishi, dalam bukunya *Young Heroes* (diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Pahlawan-Pahlawan Belia*). Wardhana pun mengakui, pembungkaman gaya penguasa Orde Baru masih terjadi di zaman ini.

Sayangnya, kebanyakan kreator budaya massa tidak sadar bahwa hak mereka sudah pula dirampas. Di bawah judul-judul *sensor Film dan Moral Rights* serta *RUU tentang Perfilman: Sumbang Saran untuk Dewan Perwakilan Daerah*, Wardhana mengurai masalah perampasan hak para pencipta karya kreatif. Menurutnya, karya seni memuat intensi: "ide, ideologi, pendapat, wacana, atau tata nilai" (hlm. 180), yang oleh penciptanya hendak disampaikan kepada massa. Memiliki ide, ideologi, pendapat, wacana, dan tata nilai adalah hak setiap warga negara. Sensor atau pemenggalan karya kreatifnya berarti "menerabas *moral rights*" (hlm. 180).

Oleh karena itu, alih-alih memperjuangkan hak dan kebebasan setiap warga negara, para kreator budaya massa malah ikut mendukung perampasan hak dan kebebasan di negeri ini, termasuk hak dan kebebas-

an mereka sendiri. Alih-alih mencerdaskan masyarakat, para kreator—terutama lewat media televisi—justru melakukan “pembloonan, penjungkirbalikan, pencampur-adukan istilah, dan sebangsanya” demi *rating!* (hlm. 124)

Mengingat Wardhana sebagai seorang jurnalis, kumpulan tulisan ini patut diperhitungkan sebagai sebuah ajakan untuk melakukan *self-critique* demi *moral rights* dan bangsa yang cerdas. Contoh-contoh pemenggalan karya kreatif dari masa lampau dan masa sekarang menegaskan analisis Wardhana tentang keberlanjutan perampasan hak berbagai orang (bukan hanya wanita) dan pembodohan bangsa ini. *self-critique* wajib dilakukan oleh para kreator budaya massa, sebab merekalah pemegang posisi strategis untuk mengubah proses pembodohan menjadi proses pembebasan dan pencerdasan massa.

Pembaca perlu mengingat bahwa buku ini merupakan kumpulan delapan belas tulisan Wardhana dari berbagai waktu dan ruang publikasi. Oleh sebab itu, ada beberapa pembahasan dan contoh kasus yang muncul berulang-ulang, antara lain, mengenai sensor film *Yang Muda Yang Bercinta* (1977) karya Sjuman Djaya dan isu perkawinan Bambang-Halimah. Dengan demikian, kedelapan belas judul pada buku tidak merepresentasikan sebuah rangkaian pemikiran yang sistematis. Namun, hal ini tidak mengurangi nilai karya Wardhana, tidak pula menumpulkan kritiknya terhadap keempat penguasa ruang publik: budaya massa, agama, kapitalisme, dan politik.

Akhirnya, menyajikan karyanya kepada masyarakat, Wardhana mengajak setiap warga negara ini untuk bersikap kritis terhadap karya-karya kreatif yang dipublikasikan lewat media cetak dan media elektronik. Masyarakat tidak perlu menunggu pemerintah dan para kreator budaya massa mengubah haluan dari pembodohan ke pencerdasan. Masyarakat sendiri harus mampu menghentikan proses pembodohan dengan menyeleksi bacaan dan tontonan yang mereka sajikan, dan memilih hanya yang mencerdaskan dirinya. (*Yap Fu Lan, Program studi Ilmu Pendidikan Teologi, FKIP, universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta*).